



Media: Republika

Hari: Rabu

Tanggal: 22 Juli 2009

Halaman: 16

"Dari Komputer Ngadat hingga Suara Bising"

Wartawan bersama anggota dewan dan mitra kerja Kantor Kehumasan dan Informasi Pemkot Yogyakarta melawat tiga hari, 14, 15 dan 16 Juli 2009 ke Jakarta. Kunjungan kerja ke Ibu kota ini untuk menimba wawasan seputar perkembangan Teknologi Informasi (TI). Reporter *Republika* Edy Setyoko mengikuti kunjungan tersebut dan berikut laporannya :

Menyongsong Era Digitalisasi Televisi Herman Adi Sulistyio, Kepala Kantor Informasi dan Kehumasan Pemkot Yogyakarta, tampak begitu *prasojo* ketika bertandang ke studio stasun televisi Indosiar. Ia datang bersama rombongan wartawan, anggota Komisi I dan staf Humas, untuk memperluas wawasan. Khususnya, perkembangan teknologi Informasi (TI) berkait dengan industri media massa dan dunia kehumasan. Rombongan 'Wong Deso' yang belajar ke pusat perkembangan IT, Ibukota Jakarta, tak sekadar hanya *men-charge* wawasan wartawan dan staf Humas. Tapi, juga membuka cakrawala anggota dewan — yang selama ini oleh sementara kalangan dianggap kurang familier dengan dunia

media massa dan kehumasan. Seperti misal, Herman mengeluh ihwal sarana komputer Humas produk tahun 1990-an. Jika dioperasikan untuk internet sering *ngadat*. Padahal, sarana ini penting bagi Pemkot Yogyakarta dalam rangka promosi industri pariwisata — satu-satunya sumber daya andalan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Gudeg. Sektor industri pariwisata memang jadi andalan. Tahun, 2006, Yogyakarta sempat "tidak makan" lantaran diguncang bencana alam gempa bumi tektonik. Sarana dan prasarana hancur hingga mengganggu sektor kehidupan. Ini salah satu bukti, pentingnya peran Humas dan media massa menjual pariwisata selaras dengan perkembangan TI. Mendengar ungkapan Herman, Triyandi Suryatama, Direktur Pemberitaan dan Program PT Indosiar Karya Mandiri, tidak kaget. Komputer yang dioperasikan di sini, kata dia, juga produk tahun 1990-an. Bicara soal komputer bukan soal tahun. Tinggal divisi mana yang menggunakan. Ini berkait dengan kepentingan kegunaan. Sarana tersebut bisa di-*upgrade* atau digu-



● Wartawan sedang mendengarkan paparan

nakan kepentingan urusan administrasi. Dialog antara tamu dan tuan rumah di ruang kantin disulap menjadi ruang pertemuan ber-langsung tampak santal. Sesekali terdengar suara orang sarapan, suara berisik hembusan *hair dryer*, karena ruang sebelah juga dimanfaatkan tata rias pengisi acara yang hendak *on air*.

"Maaf kami kekurangan ruangan. Kami terpaksa menyekat dapur kantin untuk ruang pertemuan," tutur Guffron, Humas Indosiar yang begitu ramah menerima tamu.

Namun, selaras dengan perkembangan TI sarana dan prasarana musti diperhatikan. Terutama menghadapi era *teve digital*. Kini, peme-

rintah tengah *ancang-ancang* merealisasi digitalisasi televisi. Pemerintah mencanangkan Tahun 2014 merupakan era *teve digital*. "Era *teve digital* berdampak luas bagi masyarakat penerima siaran televisi," kata Triyandi Suryatomo.

Dampak yang cukup dirasakan, *teve di rumah*, sudah tidak bisa dipakai menerima siaran *teve* lagi. Untuk bisa menerima siaran, pelanggan harus menambah *box decoder*. Harga satu alat berkisar antara Rp 400 ribu sampai Rp 700 ribu.

Di Indonesia saat ini tercatat sekitar 40 juta pelanggan siaran televisi. Paling tidak musti disediakan angka setara itu, agar mereka bisa menikmati siaran televisi. Pertanyaannya, apakah masyarakat mampu membeli alat tersebut. Belum diketahui "apakah nanti pemerintah akan memberi subsidi, seperti program konversi minyak tanah ke gas. Apakah nanti mungkin ada konversi *decoder* juga belum jelas".

Ada semacam kesangsian merealisasi program tersebut. Masalahnya, digitalisasi televisi membutuhkan investasi besar. Ini karena semua perangkat harus diganti dengan sistem digital. Vendor, TI tak menyediakan perangkat analog lagi. ■ eds

Mengisi Menanggapi Untuk diketahui
 Positif Seneo Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Humas dan Informasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005